

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Putu dan I Wayan (2018) pada 157 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Variabel independen yang diteliti meliputi profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Penelitian Darmawan dan Surakarta (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012. Variabel independen yang diteliti meliputi *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan *corporate governance* berpengaruh pada penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, ROA berpengaruh pada penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.

Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Variabel independen dalam penelitian ini *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Hasil penelitian yaitu *corporate* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### 2.2 Landasan Teori

##### 2.2.1 Agency Theory

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pembeli wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberi wewenang (agen). Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu

pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan. Agen sebagai pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal memiliki tanggung jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan tingkat return yang tinggi untuk pihak prinsipal. Namun, menurut Anthony dan Govindarajan (2009) mengatakan bahwa teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing.

Dalam teori ini terdapat perbedaan kepentingan yang akan membawa potensi terjadinya konflik keagenan dan juga memicu biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam perusahaan apabila dikelola baik oleh pemilik, disebut biaya keagenan (*agency cost*). Konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* mendorong timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dapat berupa pengeluaran untuk mengawasi agen, pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, dan pengorbanan yang berupa kurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan prinsipal dan agen.

Agen sebagai orang yang menjalankan perusahaan akan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh prinsipal. Ketidaksempurnaan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki prinsipal ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*). Dengan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal* akan mendorong agen melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan semata.

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana manajemen perusahaan sebagai agen atau pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, cenderung

akan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk menekan beban pajak perusahaan, sementara dari pihak pemungut pajak (fiskus) sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

### 2.2.2 *Trade Off Theory*

Teori *trade off* ini menjelaskan hubungan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian penggunaan hutang oleh perusahaan dimana ada pajak perusahaan yang diperhitungkan (Putera, 2006). Menurut *trade of theory*, perusahaan akan berutang sampai pada tingkat hutang tertentu dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan ini antara lain terdiri dari biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang timbul akibat dari kredibilitas perusahaan yang menurun.

*Trade off theory* ini menggunakan pilihan penggunaan hutang yang optimal. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Artinya hutang memberikan manfaat perlindungan pajak. Jadi struktur modal yang optimal terbentuk ketika manfaat perlindungan pajak dari hutang sama dengan biaya kebangkrutan yang diterima perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara menaikkan rasio hutang perusahaan sehingga tambahan hutang yang dilakukan perusahaan akan mengurangi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

*Trade Off Theory* mengemukakan bahwa hutang mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari hutang adalah bahwa pembayaran bunga akan mengurangi pembayaran kena pajak. Penghematan pajak ini akan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Hutang menguntungkan perusahaan karena adanya perbedaan perlakuan pajak terhadap bunga dan dividen. Pembayaran bunga diperhitungkan sebagai biaya dan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga

jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan berkurang. Sebaliknya, pembagian dividen kepada pemegang saham tidak mengurangi jumlah pajak perusahaan. Jadi, dari sisi pajak akan lebih menguntungkan jika perusahaan membiayai investasi dalam bentuk hutang karena adanya penghematan pajak.

### 2.2.3 *Cost of debt*

Sumber pendanaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Perusahaan memilih apakah akan menggunakan sumber pendanaan internal maupun sumber pendanaa eksternal. Sumber pendanaan eeksternal maupun internal akan sangat mempengaruhi bagaimana struktur modal perusahaan dimasa yang akan datang. Uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang berasal dari eksternal/luar perusahaan.

Bhoraj and Sengupta (2003) menunjukkan bahwa *cost of debt* sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah informasi asimetri. *Cost of debt* sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal dipengaruhi oleh faktor pajak yaitu *debt tax shields* dimana beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang.

Biaya utang menurut Fabozzi (2007) dalam Masri dan Martani (2012) adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Pernyataan standar Akuntansi Keuangan 26 (Revisi 2011) mendefinisikan biaya utang sebagai biaya pinjaman, yaitu biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan pinjaman dana. Biaya pinjaman dalam PSAK 46 (Revisi 2011) meliputi : beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif seperti dijelaskan dalam PSAK 55 (revisi 2011), beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011), selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

### 2.2.3 Profitabilitas

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) dari

pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investor dan kreditur (bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan.

Efektivitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas.

#### **2.2.4 Tax Avoidance**

##### **a. Definisi Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6) definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) yaitu:

##### **1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

### c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
  - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan dan dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menuurt golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

#### **d. Beban Pajak**

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menenukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

#### **e. Manajemen Pajak**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang dari laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan



oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Pohan 2013).

Menurut Pohan (2016) manajemen pajak adalah “usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Menurut pohan (2016) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensi beban pajak secara legal, yaitu:

- a. Penghematan pajak (*tax saving*)
- b. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- c. Penundaan pembayaran pajak
- d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- e. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
- f. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku

Berdasarkan definisi diatas strategi dalam mengefisiensi beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

#### **f. Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP), agar utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi dalam bingkai peraturan pajak (Sunday, 2008). Maka perencanaan pajak disini sama

dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Dalam peraturan pemerintah yang diatur dalam tarif PPh pasal 17 ayat 1 tentang tarif pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25%. Namun, tarif pajak tersebut bisa menjadi lebih rendah sebesar 20% dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan isi PPh pasal 17 ayat 2b yaitu “Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1b dan 2a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Penurunan tarif yang lebih rendah akan mendorong perusahaan melakukan manajemen laba dengan menggeser penghasilan kearah tarif yang lebih rendah.

#### **g. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Upaya penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *cetax evasion*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memprkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Sedangkan *tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak,

karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal, kriminal. Oleh sebab itu, sebagai *tax planner* yang baik cara ini tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan (Pohan, 2013).

Salah satu cara yang diperkenankan oleh perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalisasikan beban pajak adalah *tax avoidance*, karena *tax avoidance* bukan tindakan melanggar hukum melainkan tindakan mengambil keuntungan dari aturan yang ada untuk mengecilkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Dalam penelitian Surbakti diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak :

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Manfaat *tax planning* itu sendiri adalah :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Fadhilah (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan celah dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

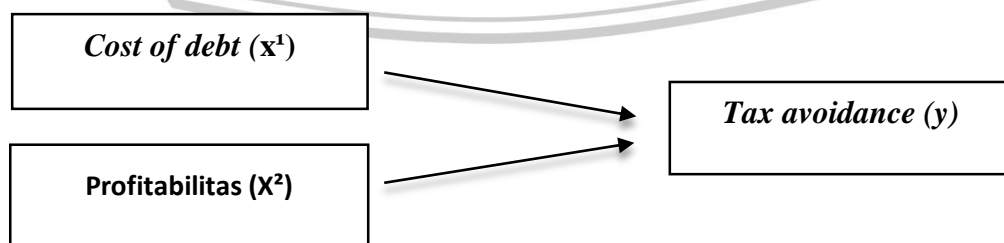
Membangun suatu perusahaan pastinya membutuhkan pendanaan atau modal. Pendanaan atau modal dapat diperoleh dari internal atau eksternal. Pendanaan internal berasal dari perusahaan itu sendiri sedangkan pendanaan eksternal berasal dari kreditur.

Dalam memilih pendanaan perusahaan perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi. Risiko ini timbul akibat dari keputusan yang diambil dalam memilih sumber pendanaan perusahaan apakah internal atau eksternal. Jika perusahaan memilih pendanaan dari internal maka risiko yang timbul relatif kecil karena berkenaan dengan pengembalian dividen yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan itu sendiri, sedangkan jika perusahaan memilih pendanaan dari eksternal maka risiko yang akan timbul relatif besar karena berkenaan dengan tingkat pengembalian bunga (*cost of debt*) kepada kreditur. Risiko yang terjadi akibat dari pendanaan dari eksternal salah satunya adalah risiko kebangkrutan.

Dalam memilih sumber pendanaan, perusahaan pastinya juga akan mempertimbangkan dari sisi pajak yang akan timbul. Pajak merupakan sesuatu hal yang tidak disukai perusahaan karena akan mengurangi kas perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak. Salah satu usaha untuk meminimalkan pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan akan mengakibatkan *cash flow* perusahaan akan meningkat sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan apakah perusahaan memilih menambah utang atau memperkecil utang. Profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan cenderung akan menggunakan dana internal yang tinggi dalam pembiayaan sehingga membuat perusahaan untuk memilih menggunakan dana eksternal berupa hutang yang lebih rendah. Utang yang ada diperusahaan akan berkaitan dengan risiko kebangkrutan. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi risiko kebangkrutan perusahaan. Utang juga berkaitan dengan bunga (*cost of debt*). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti termotivasi untuk menguji pengaruh *tax avoidance* dan profitabilitas terhadap *cost of debt*.

Pengukuran variabel independen menggunakan *effective tax rate (ETR)* dan *return on assets (ROA)* sedangkan variabel dependen diukur menggunakan rumus besarnya beban bunga perusahaan dalam satu periode dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek.



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 *Cost of debt* terhadap *tax avoidance*

Tindakan perusahaan dengan *cost of debt* akan memengaruhi *tax avoidance* perusahaan karena dengan meminimalkan pajak maka *cash flow* perusahaan akan lebih tinggi dibanding saat perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Sehingga perusahaan akan lebih fleksibel dalam menentukan struktur modal perusahaan. Modal perusahaan dapat berasal dari internal atau eksternal dari utang. Dengan *cash flow* yang tinggi perusahaan dapat menentukan apakah ingin melunasi utang atau justru menambah utang karena perusahaan merasa mampu membayar utang serta bunga (*cost of debt*). Dengan begitu *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan mempengaruhi *cost of debt* perusahaan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Indah Masri dan martani (2012) menunjukkan bahwa *tax avoidance* dan *cost of debt* berhubungan positif, dan Santosa dan Kurniawan (2016) tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI selama periode 2010-2014 juga menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap *cost of debt*. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

**H1 : *Cost of debt* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### 2.4.2 Profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *Return on assests* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Menurut Subakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *cost of debt*.**

